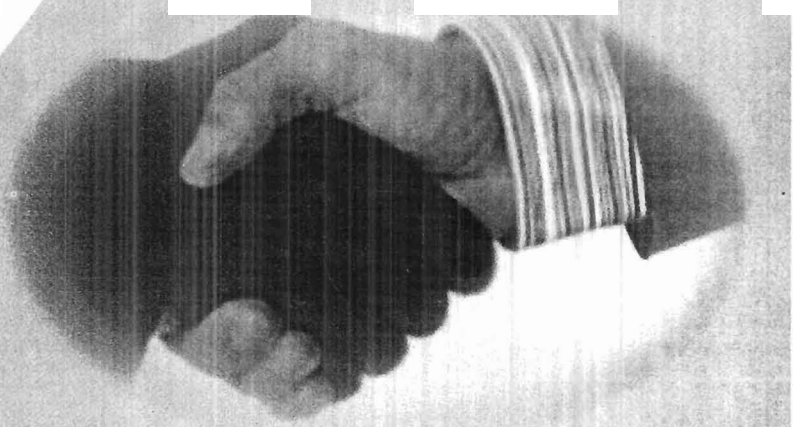


PROCEEDING

ISBN : 978-602-8124-61-4

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION OF
INDONESIA-MALAYSIA ETHNIC GROUP

**ie Development of Culture and Character Education of The Nation
Through Learning Inovation and Guidance Service
In Primary Education**



In Padang, West Sumatera
December 10, 2011

Organized by:

**PGSD FIP UNP with Kementerian Pelajaran Malaysia and
Sekolah Rendah Bestari Zaenab II No.2 Klantan**

**PROSIDING
SEMINAR INTERNASIONAL ETNIK SERUMPUN
INDONESIA - MALAYSIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANGSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**PROSIDING
SEMINAR INTERNASIONAL ETNIK SERUMPUN
INDONESIA – MALAYSIA**



**Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui
Inovasi Pembelajaran dan Layanan Bimbingan di Pendidikan Dasar**

**The Development of Culture and Character Education of The Nation
Through Learning Innovation and Guidance Service in Primary Education**

2012

**PROSIDING SEMINAR INTERNASIONAL ETNIK SERUMPUN
INDONESIA – MALAYSIA**

Diselenggarakan Kerjasama Antara,

**Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD FIP UNP) dengan
Kementerian Pelajaran Malaysia dan Sekolah Bestari Zaenab II No.2 Klantan**

Padang, 10 Desember 2011

ISBN: 978-602-8124-61-4

522 Hal

1 (Satu) Jilid 29,7x21cm

Editor,

**Dr. Taufina Taufik, M.Pd
Dr. Mardiah Harun, M.Ed
Dra. Silvinia, M.Ed
Drs. Muhammadi, M.Si
Dra. Elfia Sukma, M.Pd
Desyandri, S.Pd.,M.Pd**

Disain Sampul,
Yan Pitopang

Editor Teknik,
Desyandri, Taufina, Muhammadi

Diterbitkan oleh,

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Dicetak oleh,
Sukabina Press

© Hak Cipta terpelihara dan dilindungi Undang-undang NO. 19 Tahun 2002
Tidak dibenarkan menerbitkan ulang bagian atau keseluruhan isi buku ini
dalam bentuk apapun juga sebelum mendapat izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenanNya, prosiding ini bisa diterbitkan. Maksud diterbitkannya prosiding ini adalah realisasi dari Visi dan Misi jurusan PGSD. Visi sebagai “Pusat model pembelajaran ke-SD-an untuk menghasilkan guru SD yang profesional dengan berlandaskan iman dan tagwa pada tahun 2015” dan Misi “Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang ke-SD-an yang berkualitas melalui pengoptimalan SD yang mandiri berlandaskan iman dan taqwa. Dalam rangka mencapai visi dan misi di atas diselenggarakanlah seminar internasional pendidikan.

Seminar Internasional Etnik Serumpun Indonesia-Malaysia Kerjasama jurusan PGSD FIP UNP dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan Sekolah Rendah Bestari Zainab II Kelantan dengan Tema “*Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui Inovasi Pembelajaran dan Layanan Bimbingan di Pendidikan Dasar*” yang telah dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2011 di Padang.

Peserta seminar Internasional ini terdiri dari guru-guru Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Barat, mahasiswa PGSD FIP Universitas Negeri Padang, Mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Padang, dosen-dosen FIP Universitas Negeri Padang, Universtas Negeri Jakarta, Universitas Islam Malang, USIM Malaysia, Sekolah Rendah Bestari Zainab II Kelantan, dan Kementerian Pelajaran Malaysia dengan jumlah 750 orang.

Pemakalah Utama dua orang berasal Negara Malaysia, Kepala Sekolah Dasar Provinsi Jambi yang telah berhasil mengembangkan pendidikan budaya dan karakter bangsa, Dekan FIP Universitas Negeri Padang, dan dua orang Dosen PGSD FIP Universitas Negeri Padang. Makalah Pendamping yang dimasukkan dalam Prosiding ini berjumlah 63 makalah yang terdiri dari 10 (sepuluh) bidang kajian di Pendidikan Dasar.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada pemakalah utama dan para peserta seluruhnya yang telah berpartisipasi dalam seminar internasional ini. Semoga kegiatan dan materi seminar berguna bagi Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Pendidikan Dasar. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Walaikum Salam Wr.Wb.

Editor

Daftar Makalah

	Judul	Hal.
COVER		i
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
BAB I	MAKALAH UTAMA	1
➤	Peningkatan Kualiti Pengajaran Guru Sekolah di Malaysia. Oleh Dato' Arshad bin Mahmud (Kementerian Pelajaran Malaysia)	1
➤	Peningkatan Skill Kaunseling Guru Menghadapi Cabaran Masa Kini di malaysia. Oleh Prof. Madya Datin Dr. Sapora Sipon, M.Si (USIM Malaysia)	14
➤	Silang Budaya dan Pendidikan Multikultural di Indonesia. Oleh Firman (Dekan FIP UNP Padang)	28
➤	Penerapan Pendidikan Karakter di Sekolah (Implementing Character Education in Schools). Oleh Yalvema Miaz (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	39
	Implementasi Model Pembelajaran Inovasi dalam Meningkatkan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Sekolah Dasar. Oleh Taufina Taufik (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	46
➤	Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui Inovasi Pembelajaran dan Layanan Bimbingan. Oleh Ilyas (Kepala SD Prov. Jambi)	67
BAB II	PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA	77
	Model Pengintegrasian Pelatihan Strategi Belajar (Training Strategy) dalam Pembelajaran Berbicara pada Siswa Sekolah Dasar. Oleh Dyah Werdiningsih (Dosen UNISMA Malang)	77
	Pendidikan Karakter Melalui Pengkajian Cerita Rakyat Nusantara (Character Education Through Assessment Folklore <i>Collection</i>). Oleh Zulela Ms (Dosen PGSD FIP UNJ Jakarta)	86
➤	Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia. Oleh Darnis Arief (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	94
➤	Pembelajaran Menulis Puisi Melalui Strategi Pemetaan Pikiran untuk Membentuk Karakter Siswa SD. Oleh Elfia Sukma (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	99
➤	Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Membaca dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Oleh Ritawati Mahyuddin (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	107
	Pembelajaran Membaca Kritis dengan Menggunakan Strategi <i>Know-Want-Learned</i> (KWL) Sebagai Sarana Pendidikan <i>Karakter di SD</i> . Oleh Wasnilimzar (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	113

BAB III	PEMBELAJARAN MATEMATIKA	121
➤	Penggunaan Pendekatan Matematika Realistik (PMR) dalam Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Oleh Desniati (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	121
➤	Suasana Belajar yang Kondusif untuk Pendidikan Karakter Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oleh Mardiah Harun (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	128
➤	Hidup Berkarakter dengan Pendekatan Realistik Terhadap Konsep Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Oleh Masniladevi (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	134
➤	Pembelajaran Matematika yang Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) di Sekolah Dasar. Oleh Melva Zainil (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	141
➤	Model Pembelajaran Tematik di Sekolah Rendah Sekolah Dasar. Oleh Mursal Dalais (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	146
➤	Peran Pembelajaran Matematika dalam Upaya Turut Membangun Budaya dan Karakter Bangsa. Oleh Yetti Ariani (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	157
➤	Pembelajaran Matematika dalam Membangun Kepercayaan Diri Peserta Didik (Self-Efficacy) Melalui Pendekatan Matematika Realistik Indonesia. Oleh Yullys Helsa (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	164
BAB IV	PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)	170
➤	Pengintegrasian Karakter Cerdas dalam Pendidikan dengan Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Siswa Sekolah Dasar. Oleh Farida F. (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	170
➤	Pengembangan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Dasar. Oleh Fatmawati (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	175
➤	Meningkatkan Pendidikan Karakter Cerdas Melalui Metode Inkuiri pada Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Oleh Kartini Nasution (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	181
➤	Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dengan Menggunakan Metode Eksperimen pada Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Oleh Maimunah (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	188
➤	Implementasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran IPA dengan Menggunakan Metode Eksperimen Kelas 5 di Sekolah Dasar. Oleh Mulyani Zen (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	196
➤	Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Berbasis Outdoor dalam Meningkatkan Kemampuan Dasar Calon Guru Sekolah Dasar. Oleh Risda Amini (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	205
➤	Pembelajaran IPA dengan Pendekatan STM dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter. Oleh Silvinia (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	213
➤	Pembelajaran IPA (Sains) yang Kreatif dan Menyenangkan Peserta Didik yang Berkarakter. Oleh Syamsu Arlis (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	221
➤	Pengembangan Praktikum Pendidikan IPA dalam Membangun Karakter Siswa Sekolah Dasar. Oleh Yuliar M. (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	228

	➤	Pengintegrasian Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Tematik di Kelas Awal Sekolah Dasar. Oleh Zuryanty (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	235
BAB V		PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)	247
	➤	Pembelajaran IPS Berbasis Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Dengan Pendekatan Analitik Keteladanan di Sekolah Dasar. Oleh Arwin (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	247
	➤	Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Dengan Menggunakan Pendekatan Kooperatif Tipe Jigsaw di Sekolah Dasar. Oleh Elma Alwi (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	253
	➤	Peningkatan Pendidikan Karakter Melalui Model Problem Based Learning (PBL) pada Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Oleh Hamimah (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	260
	➤	Peningkatan Hasil Belajar dengan Berbasis Lingkungan Budaya Sebagai Sumber Belajar IPS di Sekolah Dasar. Oleh Nasrul (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	270
	➤	Karakteristik dan Model-model Pembelajaran pada Kelas Rendah di Sekolah Dasar. Oleh Zuardi (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	277
	➤	Peranan Orang Tua dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Anak. Oleh Zuraida (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	283
BAB VI		PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN)	291
	➤	Membangun Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui Metode Inkuiri pada Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. Oleh Asnidar (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	291
	➤	Implementasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran PKN dengan Menggunakan Value Clarification Approach (Pendekatan Klarifikasi Nilai) di Sekolah Dasar. Oleh Reinita (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	301
BAB VII		PEMBELAJARAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN (SBK)	307
	➤	Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Seni Musik Berbasis Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Pendidikan Dasar. Oleh Desyandri (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	307
	➤	Penerapan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran Keterampilan di Sekolah Dasar. Oleh Harni (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	319
	➤	Pendidikan Seni Musik untuk Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar. Oleh Mansurdin (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	326
	➤	Karakteristik dan Model Pembelajaran Seni di Sekolah Dasar. Oleh Yunisrul (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	332
		Mengembangkan Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah Dasar. Oleh Zainarlis (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	337
BAB VIII		PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	347

➤	Pesantren Kilat Wadah Menciptakan Anak yang Berkarakter. Oleh Dernawati (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	347
➤	Pengaruh Pendekatan Kontekstual dan Pengetahuan Awal Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Karakter Mahasiswa PGSD FIP UNP. Oleh Mansur (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	353
BAB IX	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	365
	Peranan Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak. Oleh Khairanis (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	365
	Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya di Sekolah. Oleh Nur Asma (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	369
➤	Implementasi Pembelajaran Karakter Cerdas Melalui Format Kelompok di Sekolah Dasar. Oleh Rahmatina (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	376
➤	Evaluasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Oleh Rifda Eliyasni (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	388
➤	Figur Guru yang Ideal dalam Rangka Pembentukan Kepribadian Peserta Didik yang Berkarakter. Oleh Sri Amerta (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	399
➤	Mafaat Penggunaan Media dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter. Oleh Tin Indrawati (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	404
➤	Pembelajaran yang Efektif untuk Menciptakan Karakter Siswa Sekolah Dasar. Zaiyasni (Dosen PGSD FIP UNP Padang)	411
BAB X	PENDIDIKAN UMUM	416
➤	Pengenalan Green School Berbasis Nilai Cinta Lingkungan untuk Pembelajaran di Sekolah Dasar. Oleh Ika Lestari (Dosen PGSD FIP UNJ Jakarta)	416
➤	Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Kegiatan Diagnosis Kesulitan Belajar. Oleh Asmidir Ilyas (Dosen BK FIP UNP Padang)	420
➤	Learning Through Technology Development Design Hard and Soft for Education Character. Oleh Eldarni (Dosen KTP FIP UNP Padang)	430
➤	Cultural Education Development Character Nation in Early Age Children. Oleh Farida Mayar (Dosen PG PAUD FIP UNP Padang)	444

➤	Profesional Pendidik dalam Pengembangan Karakter Budaya Bangsa di Pendidikan Dasar. Oleh Fatmawati (Dosen PLB FIP UNP Padang)	450
➤	Mengembangkan Karakter Peserta Didik Melalui Implementasi Pendidikan Inklusif. Oleh Irda Murni (Dosen PLB FIP UNP Padang)	458
➤	Pendidikan Karakter Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini. Oleh Izzati (Dosen PG PAUD FIP UNP Padang)	468
➤	Pendidikan Karakter Sebagai Konsep Dasar Kesuksesan Anak di Sekolah. Oleh Kasiyati (Dosen PLB FIP UNP Padang)	474
➤	Pengembangan Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan Nilai-nilai Budaya. Oleh Mega Iswari (Dosen PLB FIP UNP Padang)	480
➤	Pembinaan Kompetensi Pedagogi Guru dalam Rangka Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran. Rifma (Dosen AP FIP UNP Padang)	490
	Pembentukan Nilai Karakter Cerdas Melalui Pembelajaran Di Sekolah Dasar. Oleh Riska Ahmad (Dosen BK FIP UNP Padang)	499
➤	Peranan Keluarga dalam Pengembangan Budaya dan Karakter Anak. Oleh Setiawati (Dosen PLS FIP UNP Padang)	507
➤	<i>Authentic Assessment</i> Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Dalam Proses Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar. Oleh Muhammadi (Dosen PGSD FIP UNP)	512
➤	Susunan Panitia Seminar Internasional Etnik Serumpun Indonesia-Malaysia	519
➤	Susunan Acara Seminar Internasional Pendidikan	520

Silang Budaya dan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Firman
(Dekan FIP UNP)

Abstrak

Negara Indonesia didiami oleh masyarakat majemuk, yang merupakan kekayaan dan sekaligus berpotensi untuk terjadinya disintegrasi antara satu etnis dengan etnis lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk membahas silang budaya dan pendidikan multikultural di Indonesia. Karakter masyarakat dari satu etnik diperoleh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kendala utama dialami masyarakat Indonesia dalam silang budaya, diantaranya: (1) rendahnya tingkat pengetahuan, pengalaman, dan jangkauan komunikasi sebagian masyarakat, (2) kurang maksimalnya media komunikasi dalam memerankan fungsinya sebagai mediator dan korektor informasi, dan (3) paradigma pendidikan yang lebih menekankan pengembangan intelektual dengan mengabaikan pengembangan kecerdasan emosional, pembentukan sikap moral, dan penanaman nilai budaya. Upaya penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan membangun kehidupan multi kultural, meningkatkan peran media komunikasi, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya tradisional dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang membirikan peluang sama pada semua anak bangsa tanpa membedakan perlakuan, karena perbedaan etnik, budaya dan agama yang memberikan penghargaan terhadap keragaman dan memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia Internasional. Pelaksanaan pendidikan multikultur di Indonesia dapat dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, agama, sejarah, yang harus dilakukan secara komprehensif.

Kata Kunci: Budaya, Pendidikan, Multikultural

I. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia terdiri dari beranekaragam suku bangsa, agama, **bahasa dan kebudayaan yang dipersatukan oleh semboyan Bhineka Tunggal Ika.** Suku-suku bangsa tersebut umumnya berasal dan menduduki suatu wilayah pemukiman tertentu, walaupun dewasa ini sebagian anggotanya telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air, kecuali mereka yang masih menetap di kampung halamannya sendiri. Warga suku-suku bangsa yang sudah berpindah ke daerah lain tersebut, dituntut hidup bersama dengan kelompok-kelompok sosial yang berasal dari berbagai suku bangsa di perkotaan dan pusat-pusat industri maupun di tempat-tempat mereka mencari nafkah lainnya. Kontak budaya antar berbagai suku dari latar budaya berbeda tidak jarang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan dalam masyarakat.

Kemajemukan masyarakat Indonesia tidak hanya ditunjukkan oleh beranekaragamnya corak kesukubangsaan dan kebudayaan secara horizontal, tetapi juga secara vertikal juga ditunjukkan oleh kemajuan ekonomi, teknologi, dan

organisasi sosial-politik masyarakat juga beragam. Perkembangan masyarakat dan kebudayaan masing-masing suku berbeda satu dengan lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh letak geografis dan proses sejarah, perkembangan kerajaan-kerajaan besar maupun kecil dengan struktur sosial dan politik beragam serta pengaruh kebudayaan asing, sehingga melahirkan kemajemukan masyarakat Indonesia dalam berbagai budaya.

Kenyataan ditemui akhir-akhir ini di dalam masyarakat majemuk Indonesia tersebut, sering terjadi pergolakan sosial-budaya dan politik yang dapat merongrong terhadap perkembangan masyarakat dan kebudayaan, yang pada gilirannya merusak karakter bangsa Indonesia yang kehidupannya dilandasi oleh Pancasila. Konflik sosial bermunculan di berberbagai daerah silih berganti yang sulit dibendung. Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang ramah dan memiliki tata karma, tegang rasa yang sangat tinggi, seolah berubah menjadi bangsa yang brutal dan bengis. Kerusuhan antar agama yang tidak dapat dibuktikan siapa pelakunya, seperti kejadian di Situbondo pada tanggal 10 Oktober 1996. Demikian pula di Tasikmalaya pada tanggal 26 Desember 1996 terjadi kerusuhan yang dipicu oleh adanya penganiayaan dua orang santri oleh polisi setempat. Selanjutnya di Ambon terjadi pula kerusuhan antar agama pada tanggal 19 Januari 1999 terjadi tepat pada pada hari raya 'Idul Fitri', di Galela, Maluku Utara terjadi pembantaian di dalam masjid pada bulan puasa Desember 1999 dan di Poso ditemukan ratusan mayat terapung di sungai Poso pada Mei 2000 menjelang pelaksanaan MTQ ke 19.

Berbagai pertikaian etnik dan agama, seperti kasus Tentena (RCTI, 28 Mei 2005), pemboman di pasar Tentena diduga ada kaitannya dengan sisa-sisa konflik sebelumnya. Antara dua kelompok agama yang berbeda atau ada pihak luar yang dengan sengaja menungganginya. Karena semenjak tahun 1999 daerah ini telah dilanda konflik antar agama yang berkepanjangan. Dewasa ini konflik horizontal telah membawa integritas keambang kritis adalah konflik antar Islam dan Kristen di Ambon. Konflik tersebut tidak saja merusak lingkungan fisik tetapi mempertajam perbedaan golongan social (golongan putih beragama Islam dan merah beragama Kristen dengan batas giografis yang jelas) pada akhirnya berimplikasi pada rusaknya karakter bangsa. Konflik sosial tidak jarang terjadi di lingkungan persekolahan, baik konflik antar pelajar sesama pelajar, guru dengan pelajar, dan sebagainya. Berbagai ketegangan yang terjadi menunjukkan terjadinya perubahan kebudayaan yang mengarah kepada terkikisnya karakter bangsa Indonesia itu sendiri.

Potensi konflik menjadi sebuah permasalahan yang beragam dalam masyarakat majemuk. Indonesia diproklamirkan sebagai negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu sama menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Akan tetapi gagasan besar tersebut kemudian tenggelam dalam sejarah dengan politik mono-kulturnya di zaman Soekarno dan Soeharto. Demokrasi terpimpin yang diusung Soekarno telah mematikan kreatifitas lokal berbasis etnik dan budaya tertentu. Begitu pula manajemen pemerintahan yang sentralistik zaman Soeharto, sehingga falsafat Bhineka Tunggal Ika, kemudian hanya menjadi slongan dan tidak pernah diwujudkan dalam teori ketata negaraan, hubungan sosial maupun pranata sosial lainnya.

Kemajemukan masyarakat Indonesia seringkali terabaikan dalam usaha pembangunan bangsa. ada anggapan apabila suatu bangsa telah lahir, baik melalui cara-cara damai atau peperangan, segalanya telah siap untuk melaksanakan pembangunan selanjutnya. Seolah-olah masyarakat itu merupakan kesatuan sosial yang utuh.

Kenyataan ditemui adanya kemungkinan ketegangan antar kelompok dalam setiap kesatuan sosial karena perbedaan dalam mengembangkan kebersamaan. Oleh karena itu, dinamika pergolakan sosial sebagai akibat pergaulan antar suku bangsa atau golongan dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk tidak dapat diabaikan. Selain hal itu, akan menimbulkan ketidakseimbangan sosial, sesungguhnya juga dapat memacu perubahan kearah pembaharuan yang justru diperlukan dalam membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat .

Sehubungan dengan hal itu, dalam perjalan proklamasi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah mempersatukan segenap penduduk di Kepulauan Nusantara menjadi satu bangsa, telah menimbulkan berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan khusus melalui pendidikan multikultural dalam menanamkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kesatuan. Kamanto Sunarto (Sunarto, 2004 : 47) menjelaskan pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat dan terkandung juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap peserta didik agar menghargai keragaman budaya masyarakat.

Pendidikan multicultural berkembang dengan pesat pada masyarakat majemuk, Dede Rosyda (2005 ; 1) menjelaskan sejarah multicultural adalah sejarah masyarakat majemuk, Canada, Australis adalah sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturisme dan pendidikan multikultur, karena mereka adalah masyarakat imigran dan tidak dapat menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi Negara-negara tersebut merupakan contoh Negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sendiri.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, menarik ditelusuri lebih lanjut melalui tulisan ini bagaimana silang budaya dalam masyarakat dan pelaksanaan pendidikan multicultural di Indonesia. Pengkajian permasalahan tersebut sangat bermanfaat dalam upaya mencari solusi peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada masyarakat Indonesia.

II. Pembahasan

A. Silang Budaya dalam Masyarakat Indonesia

Kebudayaan dipahami dan dimaknai sebagai keseluruhan syistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui belajar (Koentjaraningrat, 1980 : 193). Sejalan dengan pengertian tersebut, tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat berhubungan dengan kebudayaan, yang diwujudkan dalam berbagai pranata sebagai mekanisme kontrol bagi tingkah laku manusia tersebut. Geertz (1973) menjelaskan kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial, oleh anggota suatu masyarakat. Sehingga suatu kebudayaan bukanlah hanya akumulasi dari kebiasaan (*Folkways*) dan tata kelakuan (*mores*) tetapi suatu sistem perilaku yang terorganisasi.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beranekaragam suku bangsa, agama, bahasa dan kebudayaan, sudah barang tentu akan mengalami berbagai permasalahan berkaitan dengan silang budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan, menjadi acuan bertingkah laku manusia sebagai makhluk individual yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dengan orientasi kebudayaannya.

Realita menunjukkan dewasa ini, persentuhan nilai-nilai budaya sebagai manifestasi dinamika kebudayaan tidak selamanya berjalan secara mulus.

Permasalahan silang buaya dalam masyarakat majemuk (heterogen) dan jamak (pluralistis) seringkali bersumber dari masalah komunikasi, kesenjangan tingkat pengetahuan, status sosial, geografis, adat kebiasaan. Kondisi tersebut merupakan kendala bagi tercapainya suatu consensus yang perlu disepakati dan ditaati secara luas. Ditambah lagi dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, akan selalu mengalami perubahan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Persentuhan antar budaya yang terjadi secara dinamis dalam proses tawar menawar bisa mewujudkan perubahan tata nilai sebagai pergeseran budaya.

Pengembangan budaya nasional bukan didasarkan kepada konformisme budaya, tetapi lebih diarahkan pada totalitas nilai dan perilaku yang mencerminkan hasrat dan kehendak masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, sehingga mempunyai dua arah pokok yaitu fungsi pelestarian dan fungsi pengembangan. Fungsi pelestarian diarahkan kepada pengenalan dan pendalaman nilai-nilai luhur budaya yang bersifat universal. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan dapat menumbuhkan dan memperkokoh rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional. Sedangkan fungsi pengembangan diarahkan kepada perwujudan budaya nasional, yaitu perpaduan keragaman budaya tradisional ditambah dengan nilai-nilai baru yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang berlaku dalam budaya masyarakat, guna memperkaya budaya bangsa dan mempekokuh jati diri dan kepribadian bangsa.

Masyarakat dan kebudayaannya pada dasarnya merupakan tayangan besar dari kehidupan bersama antara individu-individu manusia yang bersifat dinamis. Pada masyarakat yang kompleks (majemuk) memiliki banyak kebudayaan dengan standar perilaku yang berbeda dan kadangkala bertentangan. Perkembangan kepribadian individu pada masyarakat ini sering dihadapkan dengan model-model perilaku yang suatu saat diimbali sedang saat yang lain disetujui oleh beberapa kelompok namun dicela atau dikutuk oleh kelompok lainnya. Dengan demikian, seorang anak yang sedang berkembang akan belajar dari kondisi yang ada, sehingga perkembangan kepribadian anak dalam masyarakat majemuk menunjukkan bahwa pola asuh dalam keluarga lebih berperan karena pengalaman yang dominan akan membentuk kepribadian, satu hal yang perlu dipahami bahwa pengalaman seseorang tidak hanya sekedar bertambah dalam proses pembentukan kepribadian, namun terintegrasi dengan pengalaman sebelumnya, karena pada dasarnya kepribadian yang memberikan corak khas pada perilaku dan pola penyesuaian diri, tidak dibangun dengan menyusun suatu peristiwa atas peristiwa lain, karena arti dan pengaruh suatu pengalaman tergantung pada pengalaman-pengalaman yang mendahuluinya.

Masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan dalam berbagai aspek, diantaranya system ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan tidak satupun gejala perubahan sosial yang tidak menimbulkan akibat terhadap kebudayaan setempat. Kebudayaan dianggap sebagai sumber pengalaman konformisme perilaku individu dalam masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Kebudayaan cenderung mengulang-ulang perilaku tertentu melalui pola asuh dan proses belajar yang kemudian memunculkan adanya kepribadian rata-rata, atau *stereotype* perilaku yang merupakan ciri khas dan masyarakat tertentu yang mencerminkan kepribadian modal dalam lingkungan tersebut.

Konsep watak kebudayaan sebagai kesamaan regularities sifat di dalam organisasai intra psikis individu anggota suatu masyarakat tertentu yang diperoleh karena cara pengasuhan anak yang sama di dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila ini dikaitka dengan konsep watak masyarakat (social character) dilandasi oleh pikiran untuk menghubungkan kepribadian tipikal dari suatu kebudayaan (watak masyarakat) dengan kebutuhan obyektif masyarakat yang dihadapi suatu masyarakat.

Danandjaja (1988) ingin menggabungkan antara gagasan lama tentang sifat adaptasi pranata sosial terhadap kondisi lingkungan, dengan modifikasi karakterologi psiko analitik. Teori Erich Formm mengenai watak masyarakat (social character) kendati mengakui juga asumsi dari teori lainnya mengenai tranmisi kebudayaan dalam hal membentuk “kepribadian tipikal” atau kepribadian kolektif namun dia telah juga mencoba untuk menjelaskan fungsi-fungsi sosio historical dari tipe kepribadian tersebut. Yang menghubungkan kepribadian tipikal dari suatu kebudayaan dengan kebutuhan obyektif yang dihadapi suatu masyarakat. Untuk memuskan hubungan itu secara efektif suatu masyarakat perlu menerjemahkannya kedalam unsur-unsur watak (traits) dari individu anggotanya agar mereka bersedia melaksanakan apa yang harus mereka lakukan.

Hambatan-hambatan yang potensial dimiliki oleh suatu masyarakat yang plural dan heterogen juga dapat ditentukan dalam banyak aspek lainnya : Struktur sosial yang berbeda akan menghasilkan pola dan proses pembuatan keputusan sosial yang berbeda, pluralitas dan heterogenitas seperti diuraikan di atas juga tanpa memperoleh tantangan yang sama kerasnya dengan tantangan terhadap upaya untuk mempersatukannya melalui konsep negara kesatuan yang mengimplikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara sentralistik.

Masyarakat Indonesia yang majemuk yang terdiri dari berbagai budaya, karena adanya berbagai kegiatan dan pranata khusus dimana setiap kultur merupakan sumber nilai yang memungkinkan terpeliharanya kondisi kemapanan dalam kehidupan masyarakat pendukungnya, setiap masyarakat pendukung kebudayaan (culture bearers) cenderung menjadikan kebudayaannya sebagai kerangka acuan bagi perikehidupannya yang sekaligus untuk mengukuhkan jati diri sebagai kebersamaan yang berciri khas. Perbedaan antar kebudayaan, justru bermanfaat dalam mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat tersebut. Pluralisme masyarakat dalam tatanan sosial agama, dan suku bangsa telah ada sejak jaman nenek moyang, kebhinekaan budaya yang dapat hidup berdampingan secara damai merupakan kekayaan yang tak ternilai dalam khasanah budaya nasional. Permasalahan multicultural justru merupakan suatu keindahan bila identitas masing-masing budaya dapat bermakna dan diagungkan oleh masyarakat pendukungnya serta dapat dihormati oleh kelompok masyarakat yang lain.

Masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat majemuk adalah adanya persentuhan dan saling hubungan antara kebudayaan suku bangsa dengan kebudayaan lokal. Upaya penyeragaman budaya seringkali dapat memperkuat penolakan dari budaya-budaya daerah. Kondisi itu akan lebih parah bila upaya mempertahankan dan semakin menguatnya etnosentrime. Etnosentrisme secara formal didefinisikan sebagai pandangan bahwa kelompok sendiri adalah pusat segalanya dan kelompok lain akan selalu dibandingkan dan dinilai lebih rendah.. Etnosentrisme membuat kebudayaan diri sebagai patokan dalam mengukur baik buruknya, atau tinggi rendahnya dan benar atau ganjilnya kebudayaan lain dalam proporsi kemiripannya .

Di lingkungan masyarakat ditemukan dua kekuatan yaitu menerima perubahan dan menolak adanya perubahan. Meskipun selalu terdapat dua kekuatan, namun sejarah memperlihatkan bahwa kaum konserfatif cepat atau lambat akan terdesak untuk memberi tempat pada adanya perobahan. Proses itu seringkali tidak berjalan secara linier, tapi berjalan maju mundur. Konflik antara kaum progresif dengan kaum konserfative maupun konflik diantara kaum progresif itu sendiri.

Landasan sosial budaya masyarakat Indonesia yang bercorak pada masyarakat majemuk (plural society) perlu memperoleh perhatian dan dikaji kembali, karena ideology masyarakat majemuk lebih menekankan pada keanekaragaman suku bangsa

akan sangat sulit untuk diwujudkan dalam masyarakat yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencapaian tujuan proses-proses demokratisasi, ideology harus digeser menjadi ideology keanekaragaman budaya atau multi kulturalisme, Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa maka yang nampak menyolok dalam kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam komunitas-komunitas suku bangsa, dan digunakannya kesukubangsaan tersebut sebagai acuan utama bagi jati diri individu. Ada sentimen-sentimen kesuku bangsaan yang memiliki potensi pemecah belah dan penghancuran sesama bangsa Indonesia karena masyarakat majemuk menghasilkan batas-batas suku bangsa yang didasari oleh stereotip dan prasangka yang menghasilkan penjenjangan sosial, secara primordial dan sobyektif.

Kendala utama dialami masyarakat Indonesia dalam silang budaya, diantaranya: (1) rendahnya tingkat pengetahuan, pengalaman, dan jangkauan komunikasi sebagian masyarakat sehingga rendahnya daya tangkal terhadap budaya asing, (2) kurang maksimalnya media komunikasi dalam memerankan fungsinya sebagai mediator dan korektor informasi, dan (3) paradigma pendidikan yang lebih menekankan pengembangan intelektual dengan mengabaikan pengembangan kecerdasan emosional, pembentukan sikap moral, dan penanaman nilai budaya.

Upaya penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan membangun kehidupan multi kultural yang sehat, sehingga toleransi dan apresiasi antarbudaya meningkat. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat juga diatasi dengan meningkatkan peran media komunikasi untuk melakukan sensor, strategi pendidikan yang berbasis budaya. Nilai-nilai budaya tradisional dapat terinternalisasi dalam proses pendidikan baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal maupun non formal. Khususnya pendidikan di sekolah diperlukan adanya paradigma baru yang dapat menyajikan model & strategi pembelajaran yang dapat menyeimbangkan kehidupan masyarakat dari berbagai latar budaya.

B. Pendidikan Multikultural

Dewasa ini gagasan multikulturalisme mulai masuk dunia pendidikan di Indonesia. Di sisi lain Calarry Sada (Sada, 2004:85) menjelaskan pendidikan multikultural memiliki empat makna (model), yaitu : (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan (4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.

Gagasan pendidikan multikultural di Indonesia sendiri, sebagaimana digagas oleh H.A.R Tilaar adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat (Tilaar, 2004:137). Sementara Cony R. Semiawan memiliki perspektif terdiri tentang pendidikan multikultural, yakni seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mereka memiliki hak yang sama untuk mendapat prestasi terbaik (Semiawan, 2004 : 40). Sedangkan Azyumardi Azra (Azra,2004:20) menjelaskan bukan sesuatu yang taken for granted tapi harus diupayakan melalui proses pendidikan perhatian serius terhadap pengembangan sikap toleran, respek terhadap perbedaan etnik, budaya dan agama dan memberikan hak-hak sipil termasuk pada kelompok minoritas.

Berkenaan dengan uraian tersebut, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang membirikan peluang sama pada semua anak

konsep untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang tersisih dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membesarkan sebuah bangsa, karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsa.

Berdasarkan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 32 dan penjelasannya, maka dewasa ini telah berkembang pula kebudayaan nasional yang memenuhi kebutuhan akan kerangka acuan bagi penduduk Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sungguhpun kebudayaan nasional itu belum sepenuhnya berkembang dan memenuhi kebutuhan akan kerangka acuan di segala sektor kehidupan masyarakat, namun pengaruhnya cukup kuat. Kuatnya pengaruh kebudayaan nasional itu, antara lain karena sebagian besar penduduk Indonesia telah menerima dan mendukungnya sebagai pedoman bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga memperlancar keterlibatan mereka dalam kegiatan yang berskala nasional. Disamping itu, pengaruh kebudayaan-kebudayaan suku bangsa dan daerah terbatas lingkungannya dalam lingkungan kerabat maupun masyarakat daerah tertentu, maka kehadiran kebudayaan nasional memenuhi kekosongan akan kerangka acuan secara nasional setelah terjadinya pengusuran kebudayaan kolonial yang semula diberlakukan di seluruh daerah jajahan.

Pengembangan budaya nasional melalui pendidikan multikultural secara terencana di sekolah-sekolah di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Sehubungan dengan hal itu, pendidikan multikultural di Indonesia perlu dirancang Will Kymlicka (Kymlicka,2000:ix), mendeskripsikan *Multicultural Citizenship*, pengalaman di Amerika utara, maka materi-materi seharusnya disampaikan dalam pendidikan multikultural menyangkut, dengan :

1. Hak-hak individual dan hak-hak kolektif dalam masyarakat, seperti : hak untuk memeluk sebuah agama, memperoleh kehidupan yang layak, kesempatan berusaha dan yang sebangsanya. Secara kolektif, walaupun mereka berasal dari kelompok etnik minoritas dan tidak memiliki perwakilan dalam birokrasi dan lembaga legislatif, tapi mereka memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas untuk menyampaikan aspirasi politiknya, mengembangkan budayanya. (Kymlicka,2000:34).
2. Kebebasan individual dan budaya, yakni bahwa setiap individu termasuk dari etnik minoritas memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, bahkan mengembangkan dan memajukan budayanya. Kelompok etnik mayoritas harus menghargai hak-hak minoritas untuk mengembangkan kreatifitas dan budayanya itu (Kymilcka,2000:75).
3. Keadilan dan hak-hak minoritas, yakni seluruh anggota masyarakat memiliki hak yang sama memperoleh keadilan dari negara, disamping memiliki hak mengembangkan kultur etniknya, termasuk etnik minoritas yang harus mampu mengelola bahasa, dan berbagai institusi sosialnya, agar tidak hilang dalam budaya kelompok etnik minoritas (Kymlicka,2000:126).
4. Jaminan minoritas bisa berbicara dan terwakilkan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif. Mereka memiliki hak untuk bisa terwakili, tetapi karena sistem kepartaian, seringkali kelompok-kelompok etnik, budaya dan kepentingan tersebut tidak terwakili (Kymlicka,2000:131).
5. Toleransi dan batas-batasnya, yakni bahwa etnik minoritas yang tidak memiliki wakil langsung di lembaga legislatif atau dalam lembaga birokrasi pemerintahan, harus dilindungi oleh etnik atau kelompok mayoritas yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan sebagai lembaga otoritatif untuk pengambilan kebijakan-

bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama yang memberikan penghargaan terhadap keragaman dan memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia Internasional.

Implementasi pendidikan multikultural di berbagai negara berbeda. Bila melihat salah satu contoh: pendidikan multikultural di Amerika, sebagaimana dikutip oleh Tilaar dari hasil penelitian Banks (Tilaar, 2004:138) menjelaskan, implementasi pendidikan multikultural di Amerika meliputi dimensi: (1) kurikulum, yakni norma-norma kultur yang akan disampaikan pada peserta didik diintegrasikan dalam sebuah mata pelajaran, dengan rumusan kompetensi yang jelas, (2) ilmu pengetahuan, yakni perumusan keilmuan dari norma dan aturan kultur yang akan disampaikan dan dirumuskan melalui proses penelitian historis dengan melihat pada pengalaman sejarah tokoh-tokoh yang sangat konsisten dalam memperjuangkan multikulturalisme, (3) perlakuan pembelajaran yang adil, yakni perlakuan dalam pembelajaran harus disampaikan secara fair dan adil, tanpa membedakan perlakuan terhadap mereka yang berasal dari etnik dan strata ekonomi tertentu, (4) pemberdayaan budaya sekolah, yakni bahwa lingkungan sekolah sebagai *hidden curriculum*, harus memberi dukungan terhadap pengembangan dan pembiasaan multikulturalisme, baik dalam penyediaan fasilitas belajar, fasilitas ibadah, layanan administrasi maupun berbagai layanan lainnya.

Berdasarkan pengalaman masyarakat Amerika tersebut, prosedur yang harus ditempuh dalam implementasi pendidikan multikultur di Indonesia, melalui : penyiapan kurikulum, yakni menyisipkan berbagai kompetensi yang harus dimiliki peserta didik tentang multikulturalisme pada mata pelajaran yang relevan, karena multikulturalisme baru sebuah gerakan dan belum menjadi sebuah ilmu yang komprehensif. Kemudian, diikuti dengan perumusan berbagai pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural diawali dengan teori *melting pot* yang sering diwacanakan oleh J Hector seorang imigran asal Normandia. Hector dalam teorinya menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru, yakni budaya Amerika

Selanjutnya ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya kian majemuk, maka teori *melting spot* dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama *salad bowl* yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal. tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya nasional. Pada akhirnya, interaksi kultur antar berbagai etnik masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori *Cultural Pluralism*, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang *public* dan *private*. Ruang *public* adalah seluruh etnik mengatikalasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi social politik mereka. Dalam konteks ini mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya. Sedangkan ruang *private*, yang didalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa (Budianta, 2003:8-9).

Penggunaan teori tersebut di atas, bangsa Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika, Namun pada decade 1960an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika hitam, atau imigran Amerika latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya. Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan *multiculturalism*, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit. Multikulturalisme pada akhirnya sebuah

konsep untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang tersisih dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membesarkan sebuah bangsa, karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsa.

Berdasarkan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 32 dan penjelasannya, maka dewasa ini telah berkembang pula kebudayaan nasional yang memenuhi kebutuhan akan kerangka acuan bagi penduduk Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sungguhpun kebudayaan nasional itu belum sepenuhnya berkembang dan memenuhi kebutuhan akan kerangka acuan di segala sektor kehidupan masyarakat, namun pengaruhnya cukup kuat. Kuatnya pengaruh kebudayaan nasional itu, antara lain karena sebagian besar penduduk Indonesia telah menerima dan mendukungnya sebagai pedoman bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga memperlancar keterlibatan mereka dalam kegiatan yang berskala nasional. Disamping itu, pengaruh kebudayaan-kebudayaan suku bangsa dan daerah terbatas lingkungannya dalam lingkungan kerabat maupun masyarakat daerah tertentu, maka kehadiran kebudayaan nasional memenuhi kekosongan akan kerangka acuan secara nasional setelah terjadinya pengusuran kebudayaan kolonial yang semula diberlakukan di seluruh daerah jajahan.

Pengembangan budaya nasional melalui pendidikan multikultural secara terencana di sekolah-sekolah di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Sehubungan dengan hal itu, pendidikan multikultural di Indonesia perlu dirancang Will Kymlicka (Kymlicka,2000:ix), mendeskripsikan *Multicultural Citizenship*, pengalaman di Amerika utara, maka materi-materi seharusnya disampaikan dalam pendidikan multikultural menyangkut, dengan :

1. Hak-hak individual dan hak-hak kolektif dalam masyarakat, seperti : hak untuk memeluk sebuah agama, memperoleh kehidupan yang layak, kesempatan berusaha dan yang sebangsanya. Secara kolektif, walaupun mereka berasal dari kelompok etnik minoritas dan tidak memiliki perwakilan dalam birokrasi dan lembaga legislatif, tapi mereka memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas untuk menyampaikan aspirasi politiknya, mengembangkan budayanya. (Kymlicka,2000:34).
2. Kebebasan individual dan budaya, yakni bahwa setiap individu termasuk dari etnik minoritas memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, bahkan mengembangkan dan memajukan budayanya. Kelompok etnik mayoritas harus menghargai hak-hak minoritas untuk mengembangkan kreatifitas dan budayanya itu (Kymilcka,2000:75).
3. Keadilan dan hak-hak minoritas, yakni seluruh anggota masyarakat memiliki hak yang sama memperoleh keadilan dari negara, disamping memiliki hak mengembangkan kultur etniknya, termasuk etnik minoritas yang harus mampu mengelola bahasa, dan berbagai institusi sosialnya, agar tidak hilang dalam budaya kelompok etnik minoritas (Kymlicka,2000:126).
4. Jaminan minoritas bisa berbicara dan terwakilkan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif. Mereka memiliki hak untuk bisa terwakili, tetapi karena sistem kepartaian, seringkali kelompok-kelompok etnik, budaya dan kepentingan tersebut tidak terwakili (Kymlicka,2000:131).
5. Toleransi dan batas-batasnya, yakni bahwa etnik minoritas yang tidak memiliki wakil langsung di lembaga legislatif atau dalam lembaga birokrasi pemerintahan, harus dilindungi oleh etnik atau kelompok mayoritas yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan sebagai lembaga otoritatif untuk pengambilan kebijakan-

kebijakan publik (Kymlicka,2000:152).

Berdasarkan materi-materi tersebut, bangsa Amerika melaksanakan pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran bernegara bagi masyarakatnya. Di Indonesia penyajian materi tersebut sebagian telah diberikan dalam mata pelajaran pendidikan agama, sejarah dan pendidikan moral Pancasila. Sehubungan dengan hal itu, pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran agama, sejarah dan pendidikan moral Pancasila.

Pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah menurut James A Banks harus dilakukan secara komprehensif, menyangkut agama, ras, etnik dan budaya serta didukung oleh kurikulum yang memadai (Banks, 1997:78). Sehubungan dengan hal itu sekolah dituntut merencanakan dan mengontrol seluruh elemen sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan multikultural dengan baik. Guru-guru merencanakan proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap multikultur peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia dan keadilan. Sekolah diharapkan juga mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultur, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultur para peserta didiknya.

Berbagai strategi dapat dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran multikultural, diantaranya melalui : *student centered instruction*, atau pembelajaran berpusat pada peserta didik (Moore,2001:134). Melalui pendekatan ini guru dapat melakukan metode diskusi dengan berbagai variasi, kemudian simulasi dan game. Selanjutnya Sally Philip (Philip, 1997:80) mengemukakan strategi pelibatan peserta didik dalam belajar dalam bentuk *collaborative learning* (Philip, 1997:80). *Active learning*, atau belajar aktif adalah belajar yang memperbanyak aktifitas peserta didik mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber, seperti: buku teks, perpustakaan, internet atau sumber-sumber belajar lain. Melalui kegiatan tersebut peserta didik memperoleh berbagai pengalaman yang tidak saja menambah kompetensi pengetahuan mereka, tapi juga kemampuan analitis, sintesis dan menilai informasi yang relevan untuk dijadikan nilai baru.. Belajar dengan model ini biasa disebut sebagai *self discovery learning*, yakni belajar menemukan sendiri. Untuk itu guru harus mampu menjelaskan tugas yang harus dilakukan peserta didik, tujuan, sumber informasi, cara mengolahnya, membahasnya serta menarik kesimpulan. Sedangkan *collaborative learning* adalah proses pembelajaran yang dilakukan bersama antara guru dengan peserta didiknya. Guru membantu berbagai kesulitan yang dihadapi peserta didik, begitu pula peserta didik dengan peserta didik lainnya. Sehingga *peer teaching*, atau *tutorial* menjadi bagian penting dalam kegiatan belajar seperti ini.

Selanjutnya pendekatan *cooperatif learning*, yang menurut Kauchak lebih efektif daripada *groupwork* (Kauchak, 1998:234). *Groupwork* adalah sebuah proses pembelajaran yang memberi kesempatan pada semua peserta didik untuk terlibat dalam kelompoknya dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. Sehubungan dengan hal itu, guru diharuskan merencanakan proses pembelajaran, diantaranya : (1) memberitahukan tugas peserta didik secara kelompok, (2) mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tugas kelompok, (3) masing-masing peserta didik memiliki penjabaran tugas yang jelas dalam kelompoknya, (4) memberi peserta didik batas waktu yang jelas dan tegas dalam menyelesaikan tugas-tugas, (5) perintahkan peserta didik untuk menyelesaikan tugas mereka dalam kelompok.

Pelaksanaan pendidikan multikultur, melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, agama, sejarah harus dilakukan secara komprehensif, dimulai dari design perencanaan dan kurikulum melalui proses penyisipan, pengayaan dan atau penguatan terhadap berbagai kompetensi yang telah ada, mendesign proses pembelajaran yang

bisa mengembangkan sikap peserta didik untuk bisa menghormati hak-hak orang lain, tanpa membedakan latar belakang ras, agama, bahasa dan budaya, dan tanpa membedakan mayoritas dan minoritas. Selanjutnya pencapaian tujuan pendidikan multikultur harus dapat dikur melalui evaluasi, dalam bentuk tes, non-tes atau melalui proses pengamatan longitudinal dengan menggunakan portofolio peserta didik.

III. Simpulan

Watak kebudayaan diperoleh dari cara pengasuhan anak yang sama di dalam masyarakat yang bersangkutan. Hambatan-hambatan utama dalam masyarakat yang plural dan heterogen adalah : Struktur sosial yang berbeda akan menghasilkan pola dan proses pembuatan keputusan sosial yang berbeda. Kendala utama dialami masyarakat Indonesia dalam silang budaya, diantaranya: (1) rendahnya tingkat pengetahuan, pengalaman, dan jangkauan komunikasi sebagian masyarakat, (2) kurang maksimalnya media komunikasi dalam memerankan fungsinya sebagai mediator dan korektor informasi, dan (3) paradigma pendidikan yang lebih menekankan pengembangan intelektual dengan mengabaikan pengembangan kecerdasan emosional, pembentukan sikap moral, dan penanaman nilai budaya. Upaya penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan membangun kehidupan multi kultural, meningkatkan peran media komunikasi, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya tradisional dalam proses pendidikan.

Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberikan peluang sama pada semua anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama yang memberikan penghargaan terhadap keragaman dan memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia Internasional. Pelaksanaan pendidikan multikultur di Indonesia dapat dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, agama, sejarah, yang harus dilakukan secara komprehensif

Daftar Rujukan

- Aldridge, Jerry, and Renitta Goldman, (2002) : *Current Issues and Trends in Education*. Boston : Allyn and Bacon.
- Azra, Azyumardi, (2004) : *Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggalika*, dalam *Tsaqafah*, Vol. I, No.2, tahun 2003.
- Banks, A, James. 1997. *Educating Citizens in a Multicultural Society*. Teacher College Press. New York: Columbia University.
- Budianta, Melani. 2003. *Multi/cultural;lisme dan Pendidikan Multileultural, Sebuah Gambaran Umum*, dalam *Tsaqafah*, Vol. I, No.2, tahun 2003.
- Budiono Kusumohamodjojo. 2000. *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Grasindo Jakarta
- Budhisantoso, S. 2002. *Pembangunan Nasional Indonesia Dengan Berbagai Persoalan Budaya Dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta www.paskal8.com/hasilkajian_34.htm.

- Danandjaja James. 1988. *Antropologi Psikologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dede Rosyda. 2005. Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Konseptual, makalah dalam Seminar Internasional Pendidikan Multikultural. Padang : Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang.
- Kauchak, Donald P., and Paul D Eggen, (1998) : *Learning and Teaching, Research Based Method*. Boston : Allyn and Bacon.
- Kymlicka, Will. 2000). *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*. New York : Oxford University Press.
- Koentjaraningrat, (1990) : Pengantar Antropologi. Jakarta : Gramedia.
- Moore, Kenneth D. 2001. *Classrom Teaching Skill*., New York: McGraw Hill.
- Phillips, Sally. 1997. *Opportunities and Responsibilities; Competence, Creativity, Collaboration, and Caring*, dalam, John K Roth, 'Inspiring Teaching', Anker Publishing Company, USA, 1997.
- RCTI (29 Mei 2005) Dokumen Seputar Indonesia.
- Suratno, Kamanto. 2004. *Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation*, dalam Jurnal *Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, edisi I, tahun 2004.
- Sada, Clarry. 2004. *Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview*, dalam. Jurnal *Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, edisi I, tahun 2004.
- Semiawan, Conny. 2004. *The Challenge of a Multicultural Education in a Pluralistic Society; the Indonesian Case*, dalam Jurnal *Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, edisi I, tahun 2004.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Grasindo, Jakarta,2004.